

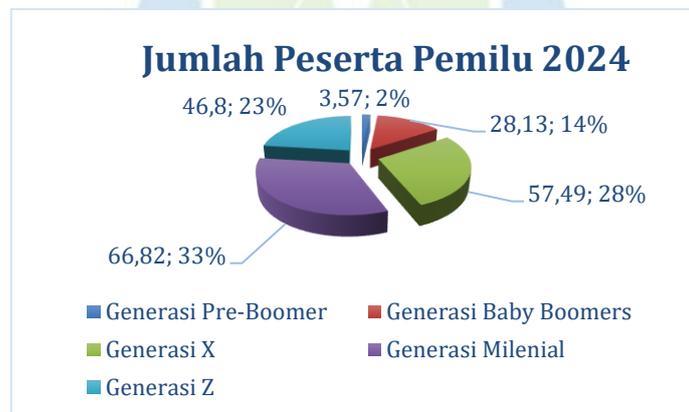
Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Political participation atau keikutsertaan politik merupakan instrumen utama sistem demokrasi yang memungkinkan terwujudnya kehendak rakyat, antara lain melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Di Indonesia sendiri, Pemilu bukan hanya representasi kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat UUD 1945, tetapi juga merupakan tolak ukur kualitas demokrasi. Dalam konsep demokrasi modern, kualitas Pemilu dinyatakan dengan ciri otonomi umum masyarakat dalam berbagai tindakan (Mashuri, 2014; Wahyudi dkk. 2013). Otonomi ini dimulai dari hak memilih dan meluas hingga keikutsertaan dalam kampanye Pemilu serta pengawasan kebijakan tertentu. Tingkat partisipasi yang tinggi mengindikasikan sehatnya tata kelola pemerintahan terhadap warga negara. Namun, rendahnya tingkat partisipasi mencerminkan rendahnya respons keterlibatannya masyarakat.

Gambar 1.1

Jumlah peserta Pemilu 2024 data KPU (2023)



Pada Pemilu 2024 memperlihatkan fenomena krusial, terjadinya lonjakan dominasi pemilih muda, yaitu pada Generasi Y atau millennial dan Generasi Z. Dari total 204,8 juta pemilih, sebanyak 56,4% terdiri dari generasi milenial dan Gen Z, dengan Gen Z menyumbang sekitar 22,85% atau lebih dari 46 juta suara (Isnur A, 2023; KPU, 2023). Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok ini menempati posisi strategis sebagai *agent of change* yang secara historis berperan aktif dalam perubahan sosial-politik Indonesia (Saryono dkk. 2022).

Masalah fundamental yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi *political participation* di kalangan pemilih muda, khususnya mahasiswa. Data dari Katadata Insight Center (2023) menunjukkan bahwa meskipun 59,8% anak muda menyatakan memiliki ketertarikan terhadap isu politik, tetapi partisipasi aktif seperti mengikuti diskusi politik (18,6%) dan pelatihan politik (16%) masih tergolong rendah. Survei lain dari *Center For Strategic And International Studies* (CSIS) Fernandes dkk. (2023) bahkan mencatat bahwa hanya 1,1% dari pemilih muda yang berminat untuk bergabung dengan partai politik. Temuan ini mengindikasikan adanya *political participation deficit*, suatu kondisi di mana generasi yang memiliki akses informasi terluas dalam sejarah Indonesia justru menunjukkan keterlibatan politik terendah dalam aktivitas substantif. Mereka memang aktif dalam ruang digital dan memiliki akses informasi yang luas, namun keterlibatan dalam aktivitas politik formal seperti kampanye, forum kebijakan, atau advokasi publik masih terbatas.

Masalah kesenjangan *political participation* pemilih muda cukup krusial, terdapat kemungkinan Indonesia menghadapi risiko serius berupa degradasi kualitas demokrasi dalam jangka panjang. Secara faktual, beberapa konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Pertama, terjadinya *legitimacy crisis* dalam sistem demokrasi. Menurut laporan Freedom House (2023), negara-negara dengan tingkat *political participation* pemuda rendah cenderung mengalami penurunan skor demokrasi dalam periode 5-10 tahun. Ketika 56,4% pemilih adalah generasi muda namun hanya berpartisipasi secara simbolik, maka keputusan politik hanya merepresentasikan sebagian kecil populasi yang aktif. Kedua, munculnya fenomena *democratic backsliding* sebagaimana terjadi di beberapa negara Asia Tenggara. Studi longitudinal oleh V-Dem Institute (2023) menunjukkan bahwa negara dengan *political engagement* gap yang tinggi di kalangan pemuda mengalami penurunan indeks demokrasi rata-rata 0,15 poin per tahun. Indonesia sendiri telah mengalami penurunan skor demokrasi dari 0,64 (2014) menjadi 0,61 (2023). Ketiga, risiko polarisasi politik yang semakin tajam. Research oleh Institute for Strategic and Development Studies (2023) menunjukkan bahwa pemilih muda yang hanya berpartisipasi secara digital tanpa keterlibatan substantif lebih rentan terhadap disinformasi dan *echo chamber*, yang dapat memperburuk polarisasi sosial-politik.

Kesenjangan ini berisiko menciptakan demokrasi yang dangkal. Di satu sisi, Gen Z sangat terhubung dengan isu-isu politik melalui media digital, namun di sisi lain, keterpaparan terhadap konten berunsur politik, narasi emosional, dan disinformasi dapat membentuk persepsi negatif terhadap politik formal (IDN Research Institute, 2023; Kulau,

2024). Hanya 3,06 dari 5,00 skor yang diberikan generasi muda untuk kepercayaan terhadap kebersihan partai politik dari korupsi (IDN Research Institute, 2023). Akibatnya, mahasiswa sebagai bagian dari Gen Z ini lebih banyak hanya menunjukkan *participation* simbolik seperti mencoblos tanpa disertai keterlibatan aktif dalam proses diskusi keputusan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat melahirkan generasi pemilih yang melek digital tetapi tidak memiliki keaktifan dan komitmen terhadap sistem politik yang berjalan.

Untuk memahami dan mendalami fenomena *political participation* pada pemilih muda khususnya mahasiswa, peneliti melakukan studi awal dengan pendekatan deskriptif eksploratif yaitu mencoba menggali dengan pertanyaan terbuka untuk melihat tanggapan secara mendalam, terhadap 31 pengurus aktif organisasi mahasiswa intra kampus yaitu Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) Psikologi. Pemilihan subjek DEMA-F didasarkan pada relevansi mereka sebagai representasi mahasiswa yang memiliki peran strategis dalam aktivitas organisasi dan advokasi kebijakan kampus, sehingga lebih terekspos pada isu-isu sosial-politik dibanding mahasiswa pada umumnya. Responden dalam studi awal ini merupakan mahasiswa aktif yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti, yaitu pengguna aktif media sosial selama masa Pemilu 2024, serta telah berpartisipasi dalam Pemilu 2024 sebagai pemilih muda. Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring menggunakan *google form*, dengan fokus utama pada persepsi, motivasi, dan hambatan mahasiswa dalam keterlibatan politik khususnya pada masa Pemilu 2024.

Hasil studi awal menunjukkan bahwa mayoritas responden (87%) menyatakan meyakini bahwa suara mereka dapat mempengaruhi terhadap hasil Pemilu. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa pandangan responden mengatakan bahwa “satu suara dapat menentukan arah masa depan bangsa”, “suara mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara”, dan “partisipasi adalah bentuk kontribusi politik paling sederhana”. Temuan ini merepresentasikan tingginya tingkat *political efficacy*, yakni keyakinan bahwa tindakan politik yang mereka lakukan, khususnya dalam bentuk memberikan suara yang dapat memberi dampak nyata terhadap proses dan hasil politik.

Namun demikian, di balik keyakinan tersebut, muncul sejumlah responden mengemukakan rasa keraguan terhadap aktor maupun lembaga politik yang berperan dalam proses Pemilu. Sebagian besar memiliki rasa keraguan mereka untuk memilih, dengan alasan seperti kekecewaan terhadap janji politik yang kerap kali tidak ditepati, perasaan bahwa wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat, serta penilaian terhadap rendahnya kinerja institusi pemerintahan. Ungkapan-ungkapan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Walaupun tidak semua

responden menyampaikan sikap penolakan secara eksplisit, pola jawaban mereka menunjukkan adanya keterbatasan rasa percaya terhadap institusi politik. Dalam beberapa kasus, keraguan ini bahkan berdampak pada kecenderungan untuk menarik diri dari keterlibatan politik yang lebih aktif. Fenomena ini menjadi penting untuk ditelaah lebih lanjut, karena tingkat *trust* terhadap sistem politik atau mengarah pada istilah *political trust* diduga turut memengaruhi apakah seseorang akan terus berpartisipasi secara bermakna atau justru bersikap pasif dalam kehidupan demokratis.

Hal ini tercermin pula dalam kecenderungan partisipasi yang bersifat pasif di kalangan responden. Hanya 3% responden yang mengaku terlibat aktif dalam kegiatan politik seperti diskusi publik, kampanye, atau keterlibatan dalam organisasi politik. Sebagian besar responden menyatakan bahwa keterlibatan mereka bersifat sesekali, dan beberapa lainnya bahkan jarang terlibat. Dari tanggapan yang diberikan, terlihat bahwa *political participation* mereka sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara persepsi terhadap efektivitas suara dan sikap terhadap situasi politik yang dihadapi. Beberapa menyatakan terdorong untuk berpartisipasi karena kesadaran politik dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa, sementara yang lain cenderung pesimis dan apatis karena merasa tidak memiliki kontrol atas hasil politik yang mereka ikuti.

Dengan demikian, studi awal ini memperlihatkan keterkaitan yang relevan dengan arah penelitian. Temuan bahwa sebagian besar responden percaya suara mereka penting, tetapi *participation* tetap rendah, mengindikasikan adanya pengaruh dari *political efficacy* terhadap *political participation*. Di sisi lain, adanya keraguan terhadap institusi politik yang dominan di antara responden menunjukkan bahwa faktor kepercayaan atau *political trust* terhadap sistem politik juga turut berperan dalam menentukan tingkat *political participation*. Lebih jauh lagi, interaksi antara kedua aspek ini menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Tingginya keyakinan terhadap keyakinan diri tidak otomatis menghasilkan keterlibatan politik yang tinggi jika tidak didukung oleh rasa *trust* terhadap sistem politik. Sebaliknya, ketika keduanya berjalan beriringan, terdapat kemungkinan keterlibatan dalam kegiatan politik juga semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana kombinasi antara persepsi terhadap kemampuan diri dan *trust* terhadap sistem politik dapat memengaruhi tingkat *political participation* mahasiswa sebagai bagian dari generasi pemilih muda dalam Pemilu 2024.

Hasil studi awal diatas yang peneliti lakukan, sejalan juga adanya beberapa kajian terdahulu misalnya dari Nurfitri (2018) terkait mahasiswa di Kota Semarang mengenai “Hubungan antara *Political Efficacy* dan *Political Trust* dengan *Political participation* Daring

pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial di Kota Semarang”, menunjukkan bahwasanya *political efficacy* dan *political trust* mempunyai korelasi yang signifikan dengan *political participation* daring. Mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan Pilkada Semarang menunjukkan tingkatan *Political efficacy* di mana lebih tinggi, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas politik secara daring. Lalu ada dalam penelitian Wibowo dkk. (2020) mengenai “*Political efficacy* dan Jenjang Partisipasi politik Pemilih Pemula” menjelaskan, *political efficacy* mampu dijelaskan sebagaimana persepsi individu terkait pribadinya sekaligus kemampuannya guna mempengaruhi politik dalam kondisi tertentu.

Ada dua klasifikasi *political efficacy*: *efficacy internal* dan *efficacy external*. *Efficacy internal* adalah keyakinan bahwasanya individu mampu paham akan politik, oleh karena itu, dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan efikasi eksternal adalah keyakinan bahwa pemerintah akan merespons tuntutan yang diajukan oleh individu tersebut (Wibowo dkk. 2020). Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anderson (2010), ditemukan bahwasanya ada tiga faktor utama dimana mempengaruhi partisipasi politik, yaitu *sense of community*, kepercayaan personal, dan *Political efficacy* internal. Dari penelitian-penelitian mengenai *Political efficacy* diatas terdapat faktor-faktor, *Political efficacy* internal serta kepercayaan personal di mana memiliki pengaruh langsung kepada tingkat *political participation* individu.

Dalam penelitian Matulesy & Samsul (2013) mengenai “*Political efficacy, Political trust* dan *Collective Self Esteem* dengan Partisipasi Dalam Gerakan Mahasiswa” juga menekankan bahwa *political efficacy* memengaruhi partisipasi dalam gerakan sosial. *Political efficacy* adalah keyakinan individu bahwa suara mereka memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Craig dkk. 1990 dalam Fitriah (2014) menerangkan terkait *political efficacy* mencerminkan kepercayaan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya guna berkontribusi pada perubahan politik. Dalam penelitian Schulz (2005) lebih lanjut mengenai *political efficacy* eksternal dan internal, menunjukkan bahwasanya *political efficacy* eksternal, yang merujuk pada keyakinan pada sistemasi politik responsif kepada tuntutan berpolitik; dan *political efficacy* internal, yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang akan kompetensinya dalam memengaruhi keputusan politik. Dalam hasil penelitian oleh (Fitriah, 2014) dan Zaenumillah (2017) menunjukkan bahwasanya *political efficacy* berhubungan positif kepada partisipasi politik, di mana peningkatan *political efficacy* internal individu berkorelasi dengan peningkatan *political participation* di masyarakat.

Selanjutnya penelitian-penelitian sebelumnya yang sejalan juga dengan arah penelitian dari penelitian Hayaatunnisa (2019), mengenai “Pengaruh *Political Trust* dan *Political Efficacy* terhadap partisipasi politik”, *Political trust* adalah keyakinan, harapan, dan sikap manusia kepada institusi politik, politisi, beserta sistem民主nya. Ketika harapan individu kurang terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan pesimisme dan mengurangi *political participation* dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan proses politik secara keseluruhan. Lalu menurut teori penelitian dari Grimmelikhuijsen & Knies (2015), *Political trust* memiliki beberapa dimensi, antara lain *competence*, yaitu persepsi bahwa pemerintah efektif, profesional, dan cakap; *benevolence*, yakni keyakinan adanya kepedulian pemerintah terhadap kemakmuran masyarakatnya; pun *integrity*, yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintahnya dalam memenuhi janjinya.

Fenomena kesenjangan antara tingginya keyakinan mahasiswa terhadap efektivitas suara (*political efficacy*) dan rendahnya kepercayaan mereka pada institusi politik (*political trust*) menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi digital di Indonesia. Generasi Z, khususnya mahasiswa yang diharapkan menjadi *agent of change*, hanya menunjukkan partisipasi simbolik yang tinggi, seperti mencoblos dalam Pemilu, tetapi minim keterlibatan substantif dalam diskusi kebijakan, advokasi publik, atau gerakan sosial. Sejauh ini, studi nasional baik yang dilakukan Fitriah (2014) yang membahas efikasi internal, Akhrani dkk. (2018) dan Munawarah & Kristanto (2022) membahas mengenai *political trust* yang dimana masih membahas kedua variabel ini secara terpisah atau dalam konteks daring dan Pemilu lokal. Padahal, dalam konteks Pemilu 2024 yang menghadirkan tantangan baru era *post-digital election*, interaksi antara *political efficacy* dan *political trust* secara simultan perlu diungkap untuk memahami hambatan dan potensi mobilisasi politik mahasiswa.

Dari tingginya dominasi pemilih muda dalam Pemilu 2024 khususnya dari kalangan mahasiswa Generasi Z yang memiliki akses luas terhadap informasi dan kapasitas intelektual yang memadai muncul harapan besar terhadap peran mereka dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan (ormawa) secara teoritis memiliki peluang lebih besar untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan menjadi motor penggerak *political participation* di tingkat akar rumput. Namun, hasil studi awal terhadap pengurus aktif DEMA-F Psikologi justru menunjukkan adanya ketimpangan, meskipun sebagian besar responden memiliki keyakinan bahwa suara mereka berpengaruh terhadap hasil Pemilu (tingginya *political efficacy*), namun tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas politik tetap rendah.

Pemilihan pengurus aktif Dema-F Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebanyak total keseluruhan anggota 50 orang, sebagai subjek penelitian didasarkan pada relevansi posisi mereka sebagai representasi mahasiswa yang memiliki peran strategis dalam aktivitas organisasi dan advokasi kebijakan kampus. Keterlibatan mereka dalam dinamika pengambilan keputusan di lingkungan kampus menjadikan mereka kelompok yang lebih terekspos pada isu-isu sosial-politik dibanding mahasiswa pada umumnya. Meskipun berasal dari disiplin ilmu psikologi, pemahaman mereka terhadap perilaku, motivasi, dan dinamika sosial memungkinkan mereka untuk merespons isu politik dengan sudut pandang psikologi. Dengan demikian, pengurus Dema-F Psikologi dipandang sebagai kelompok yang relevan untuk merepresentasikan pemilih muda yang aktif secara sosial dan potensial dalam konteks partisipasi politik.

Meskipun fenomena pemilih muda melibatkan jutaan individu, penelitian ini secara strategis membatasi subjek pada 50 pengurus DEMA-F Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan beberapa alasan metodologis dan substantif yang kuat. Pertama, relevansi teoretis: Pengurus DEMA-F merupakan kelompok yang secara teoretis memiliki peluang lebih besar untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan menjadi motor penggerak *political participation* di tingkat akar rumput. Keterlibatan mereka dalam dinamika pengambilan keputusan di lingkungan kampus menjadikan mereka kelompok yang lebih terekspos pada isu-isu sosial-politik dibanding mahasiswa pada umumnya. Kedua, kedalaman analisis: Dengan fokus pada kelompok yang lebih kecil namun homogen dalam hal keterlibatan organisasi, peneliti dapat menggali persepsi, motivasi, dan hambatan yang dihadapi mahasiswa dalam keterlibatan politik secara lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih nuanced terhadap interaksi antara *political efficacy* dan *political trust*. Ketiga, representativitas strategis: DEMA-F sebagai representasi mahasiswa aktif di kampus memiliki relevansi yang kuat dalam konteks partisipasi politik. Meskipun forum politik di kalangan mahasiswa mungkin tidak sekuat di masa lalu, DEMA-F tetap berperan sebagai wadah untuk advokasi dan diskusi politik, sehingga relevansi penelitian ini tetap terjaga dalam konteks *contemporary political engagement*.

Temuan ini memberi indikasi bahwa *political efficacy* belum tentu cukup untuk mendorong *political participation* yang aktif. Dalam konteks ini, muncul gejala-gejala rendahnya *political trust* terhadap sistem politik dan aktor-aktornya mulai dari rasa ragu terhadap janji politik hingga persepsi negatif terhadap kinerja wakil rakyat yang turut menghambat keterlibatan politik mahasiswa. Fenomena ini selaras dengan studi-studi terdahulu yang menunjukkan bahwa *political trust* tidak hanya bergantung pada persepsi *self*

efficacy, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana individu mempercayai responsivitas dan integritas institusi politik. Dengan demikian, *political efficacy* dan *political trust* dipandang sebagai dua komponen krusial yang dapat saling memperkuat atau justru saling menetralkan pengaruhnya terhadap *political participation*. Ketika keduanya hadir secara simultan, kemungkinan partisipasi yang aktif dan bermakna akan semakin besar. Sebaliknya, keberadaan salah satu tanpa dukungan yang lain dapat menghasilkan keterlibatan yang simbolik dan tidak berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political efficacy* dan *political trust* terhadap *political participation* pada pemilih muda, khususnya mahasiswa aktif dalam organisasi kemahasiswaan pada Pemilu 2024. Penelitian ini juga diharapkan menjawab urgensi tersebut dengan mengembangkan model analisis integratif yang menggabungkan kedua konstruk psikologis dalam satu kerangka, berfokus pada pengurus Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sampel yang merepresentasikan mahasiswa aktif dan terekspos isu sosial-politik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memetakan pengaruh parsial *political efficacy* dan *political trust* terhadap keikutsertaan politik, tetapi juga menguji bagaimana kedua variabel ini saling memoderasi dan memperkuat, sehingga memberikan gambaran kebaruan dalam literatur psikologi politik Indonesia di era demokrasi digital.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *political efficacy* berpengaruh secara parsial terhadap *Political participation* pada pemilih muda?
2. Apakah *political trust* berpengaruh secara parsial terhadap *Political participation* pada pemilih muda?
3. Apakah *political efficacy* dan *political trust* berpengaruh secara simultan terhadap *Political participation* pada pemilih muda?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *political efficacy* terhadap *Political participation* pada pemilih muda.
2. Untuk mengetahui pengaruh *political trust* terhadap *Political participation* pada pemilih muda.

3. Untuk mengetahui pengaruh *political efficacy* dan *political trust* terhadap *Political participation* pada pemilih muda.

Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian yang akan diperoleh adalah:

Kegunaan Teoritis. Penelitian ini bertujuan memperkaya kajian psikologi politik, khususnya mengenai pengaruh *political efficacy* dan *political trust* terhadap *political participation* pada pemilih muda, serta memperkuat teori-teori sebelumnya dalam konteks demokrasi modern.

Kegunaan Praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, penyelenggara Pemilu, dan organisasi mahasiswa dalam meningkatkan literasi serta keterlibatan politik generasi muda, terutama dalam membangun rasa *political efficacy*, *trust* dan *participation* yang baik dan aktif.

